

TAK ADA KASUS, PEMKOT TETAP ANTISIPATIF KASUS ANTRAKS

Lalu Lintas Peredaran Daging Tak Luput Pengawasan

YOGYA (KR) - Sejak ada temuan kasus antraks di dua wilayah di DIY, Pemkot Yogya langsung melakukan serangkaian pemeriksaan. Meski tidak ada temuan kasus di Kota Yogya namun langkah antisipatif tetap dilakukan. Salah satunya dengan memastikan lalu lintas peredaran daging maupun hewan ternak terawasi secara optimal.

"Setelah ada informasi satu kasus kematian dan beberapa suspek antraks di dua kabupaten DIY, kami melakukan peningkatan dan kewaspadaan antraks pada hewan ternak yang ada di Kota Yogya. Kalau gejala pada hewan memang lebih bisa dikenali oleh petugas, tapi dari sisi konsumen harus waspada terkait kondisi daging yang akan dibeli ataupun konsumsi," jelas Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Sri Panggati, Jumat (15/3). Menurut dia, berdasarkan hasil pemantauan sejauh ini tidak ada temuan kasus antraks di Kota Yogya. Lalu lintas keluar masuknya hewan ternak maupun daging juga dipantau dan berjalan sesuai prosedur. Dirinya mengimbau konsumen agar mampu memahami dalam memilih daging. Daging bagus memiliki ciri warna merah segar atau cerah, tidak berbau busuk, kondisi serat daging konsisten kenyal dan tidak terlalu berair.

Oleh karena itu jika masyarakat mendapati daging dengan ciri di luar itu apalagi harganya murah maka patut dicurigai. "Beli daging sapi, kambing ataupun domba di tempat yang hewannya disembelih di RPH dipastikan sudah bagus karena sebelum dan sesudah disembelih kami lakukan pemeriksaan," imbaunya.

Sedangkan daging yang berasal dari luar daerah, imbuh Panggati, harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan atau pemeriksaan ulang. Pihaknya juga memiliki gugus tugas yang rutin melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional. Menurutnya dikarenakan lalu lintas ternak dan daging selama Ramadan meningkat maka pemantauan serta pengawasan semakin digencarkan dengan melakukan pembinaan kepada peternak. "Untuk sapi, kambing dan domba yang akan dipotong harus dipastikan sehat, prosesnya sesuai dengan yang diatur dalam Perda 21/2009 tentang Pemotongan Hewan dan

Penanganan Daging. Semua hewan harus dipotong di RPH dan akan diperiksa sebelum dan sesudah dipotong," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Aryani, mengatakan untuk Kota Yogya relatif aman, karena jalur lalu lintas hewan ternak maupun daging terawasi ketat ditambah dengan wajib melampirkan pelampiran Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari wilayah asal. "Penyebab utama antraks adalah spora yang merupakan partikel tahan akan perubahan lingkungan. Hewan ternak yang berpotensi menularkan di antaranya sapi, kerbau, kambing dan domba. Selain itu juga bisa secara kontak langsung dari spora antraks di tanah, rumput atau basal dari hewan sakit. Lalu kulit, daging, tulang dan darah hewan yang disembelih. Juga bisa karena mengonsumsi daging ataupun produk dari hewan ternak yang sakit antraks," katanya.

Kendati tidak ditemukan kasus suspect antraks di Kota Yogya namun layanan kesehatan termasuk pengobatannya tetap disiapkan. Saat ini justru Pemkot lebih fokus mengedepankan upaya pencegahan agar jangan sampai terjadi kasus. (Dhi)-f

Safari Tarawih, Bangun Dialog Pemkot dan Warga



KR-Istimewa

Singgih Raharjo didampingi Kepala Kantor Kemenag Kota Yogya dan Ketua Baznas Kota Yogya menyerahkan bantuan.

YOGYA (KR) - Seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya, pejabat Pemkot Yogya bersafar ke wilayah sekaligus menjalankan ibadah tarawih bersama warga. Ajang tersebut sekaligus untuk membangun dialog antara unsur pemerintah dengan masyarakatnya.

Selama Ramadan terdapat 14 masjid atau musala yang menjadi tujuan kegiatan silaturahmi pada momentum tarawih tersebut. Seluruhnya tersebut di tiap kemantren yang ada di Kota Yogya. "Ini adalah cara kami untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan warga," ungkap Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, di sela kegiatan safari tarawih di Masjid Muqarrabin Bener Tegalrejo, Kamis (14/3) malam.

Menurutnya, kegiatan safari atau silaturahmi tarawih juga menjadi bagian dalam mendukung kegiatan keagamaan di wilayah. Ramadan yang menjadi bulan penuh kemuliaan bagi umat muslim harus mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah. "Manfaatkan bulan Ramadan ini dengan perbanyak ibadah, khususnya salat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan. Teruslah istiqomah dalam melaksanakannya sampai malam terakhir," pesan Singgih.

Pada kesempatan itu, Singgih turut mengajak

sejumlah pejabat perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga dirinya juga meminta kepada jamaah untuk memberikan masukan kepada Pemkot agar dapat terus melayani warganya dengan baik.

Di samping itu Pemkot juga menyerahkan bantuan berupa dana hibah untuk rehabilitasi tempat ibadah. Setiap masjid yang sudah menjadi sasaran mendapatkan Rp 10 juta. Bantuan tersebut berasal dari Pemkot Yogya melalui Kementerian Agama Kota Yogya, Bank BPD DIY, Baznas Kota Yogya, Bank Jogja, PDAM Tirtamarta, dan Jogjatama Vishesa. Selain itu ada bantuan sejumlah Al Qur-

an dan puluhan buku.

Sementara itu Ketua Takmir Masjid Muqarrabin Feri, menyambut baik kedatangan para rombongan Pemkot Yogya. Dirinya berharap kehadiran rombongan tersebut akan membawa keberkahan bagi masjid dan lingkungan sekitar. Feri menjelaskan Masjid Muqarrabin berdiri pada tahun 1930. Untuk renovasi pertama dilakukan pada tahun 1965. Seiring berjalannya waktu, masjid ini terus mengalami perbaikan. "Renovasi kedua dilakukan pada tahun 2001, dan yang terakhir kita lakukan pada tahun 2020 lalu. Semua ini swadaya dari masyarakat," ungkapnya.

Terkait kegiatan keagamaan, rutih digelar dengan momentum atau hari tertentu. Di antaranya pengajian tiap Rabu malam, Kamis malam, dan Ahad pagi. (Dhi)-f

Honda Sebarkan "virus" Safety Riding ke Rumah Sakit Panti Rapih



YOGYAKARTA - Sekarang sudah banyak perusahaan yang sadar akan pentingnya keselamatan berkendara bagi karyawannya. Hal ini dikarenakan karyawan merupakan aset berharga bagi suatu perusahaan. Tim Instruktur Safety Riding Astra Motor Yogyakarta selaku main dealer sepeda motor Honda wilayah Yogyakarta, Kedu, dan Banyumas memberikan sosialisasi safety riding ke Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang sebagian besar karyawannya menggunakan sepeda motor.

Sebanyak 50 karyawan Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang terdiri dari staff dan perawat mengikuti pelatihan berkendara di mulai dengan pemaparan teori. Di mana para peserta diberikan pemahaman arti pentingnya perlengkapan berkendara, cara mengantisipasi dan memprediksi potensi bahaya di jalan, dan juga teknik berkendara yang aman bagi para peserta. Selain itu para peserta juga mengikuti sesi simulasi menggunakan alat simulator berkendara atau Honda Riding

Trainer. Alat simulator ini berfungsi meningkatkan reflek atau analisa terhadap suatu kondisi bahaya yang ada di jalan.

Sesi yang paling menarik adalah sesi praktek. Selain para peserta diajarkan terkait postur berkendara yang benar agar dalam berkendara tidak cepat mengalami kelelahan, para peserta juga diberikan demonstrasi terkait blindspot area. Para peserta juga berkesempatan praktek menggunakan motor Listrik (Electric Vehicle) EM1 produk terbaru dari Honda. Sehingga bisa langsung merasakan perbedaan berkendara menggunakan motor bahan bakar dan motor Listrik (Electric Vehicle) Em1.

"Semua pengendara mempunyai tujuan yang sama dalam berkendara yaitu keselamatan. Buatlah hidup kita penuh arti dengan menempatkan keselamatan berkendara diatas kepentingan lainnya saat berada di jalan raya" pungkas Community Development & Safety Riding Supervisor Astra Motor Yogyakarta Muhammad Ali Iqbal. (*)

'KR' Jadi Sumber Data Indek Demokrasi Indonesia

YOGYA (KR) - Sebagai surat kabar dengan oplah terbesar dan jangkauan terluas di Provinsi DIY, SKH *Kedaulatan Rakyat* (KR) dipilih sebagai sumber data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 di DIY. Pemberitaan fakta/kejadian yang dimuat menjadi acuan dengan dukungan data resmi dokumen (Perda, Pergub, Perbup, dan lainnya), serta berita online dari 7 portal.

"Juga digelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder," tutur Pemateri IDI DIY 2023 Soman W Dharma SSI MT, Statistisi Ahli Madya dari BPS DIY dalam FGD IDI 2023, Kamis (14/3) di aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY.

Acara FGD dibuka Kepala BPS DIY Ir Herum Fajarwati MM dan Kepala Badan Kesbangpol DIY,



KR-Juvinarto

Soman W Dharma SSI MT.

Dewo Isnu Broto Imam Santoso SH. "IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan kuantitatif (review surat kabar dan dokumen) dan kualitatif (FGD)," jelasnya.

Komponen penyusun IDI, lanjut Soman terdiri dari Kebebasan (7 indikator),

Kesetaraan (7 indikator) dan Kapasitas Lembaga (8 indikator). "IDI bisa menggambarkan dimensi politik, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial di DIY sepanjang 2023," ungkapnya.

Untuk itu FGD IDI sebagai proses pengumpulan data dan informasi melalui diskusi kelompok ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan atas data yang telah dikumpulkan, melakukan eksplorasi, menggali informasi, dan sosialisasi indikator-indikator yang digunakan IDI, jelas Soman.

Sementara Kabid Bidang Politik dalam Negeri (Pol-dagri) Kantor Badan Kesbangpol DIY Bagus Senoadji ATD MT menyebutkan FGD dihadiri peserta perwakilan dari Pemda, Pold, OPD terkait, LSM, akademisi, media dan lainnya yang terkait. (Vin)-f

CUACA EKSTREM MASIH BERPOTENSI TERJADI BPBD DIY Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

YOGYA (KR) - Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis (14/3), tidak hanya mengakibatkan banyaknya pohon tumbang, tapi juga kerusakan bangunan dan korban luka-luka. Kondisi tersebut terjadi hampir merata di sejumlah daerah di DIY. Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan BPBD DIY meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan lebih peka dengan kondisi lingkungan sekitar.

"Hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis (14/3) merata di hampir seluruh wilayah DIY. Dampak cuaca ekstrem tersebut telah mengakibatkan adanya pohon tumbang dan kerusakan bangunan. Mengingat datangnya bencana alam yang bersifat mendadak dan kadang sulit diprediksi, kami minta masyarakat lebih waspada. Dengan begitu saat bencana terjadi mereka tahu langkah apa yang harus dilakukan," kata Kepala Pelaksana BPBD DIY, Noviar Rahmad di Yogyakarta, Jumat (15/3).

Dikatakan, berdasarkan data dan laporan yang diterima BPBD DIY dampak cuaca ekstrem terjadi di wilayah Gunungkidul, pohon tumbang terjadi di 74 titik, dan rumah rusak mencapai 45 unit. Selain itu tercatat 2 kandang ternak, dan 24 titik akses jalan terdampak.

Adapun untuk jaringan listrik terdampak 24 titik, tiang listrik 2 unit, fasilitas umum 1 lokasi, fasilitas pendidikan 1, tempat usaha 4 unit. Sementara untuk Kulonprogo pohon tumbang ada 32 titik, akses jalan 13 titik, jaringan listrik 2 titik. Tiang listrik 1 unit, jaringan internet 1 titik, fasilitas ibadah 2 titik, rumah 13 unit, dan kendaraan roda empat 2 unit.

"Kalau di Sleman, dampak kerusakan akibat cuaca ekstrem pohon tumbang di 29 titik, akses jalan 5 titik, jaringan listrik 6 titik, jaringan internet 4 titik. Selain itu PJU 1 titik, fasilitas ibadah 1 titik, tempat usaha 2 titik, rumah 7 titik, kandang ternak 2 titik, dan motor 3 unit," terangnya.

Lebih lanjut Noviar menambahkan, kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem masih berpotensi dalam beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu pihaknya meminta agar masyarakat selalu memantau dan mengikuti perkembangan informasi dari BMKG.

Selain itu juga melakukan pemangkasan pohon lapuk dan cabang berlebih yang berpotensi mengancam jika terjadi angin kencang. "Apabila terjadi angin kencang disertai petir sebaiknya warga menghindari pohon besar, tiang listrik, balih, daerah rawan longsor dan Daerah Aliran Sungai (DAS)," ujarnya. (Ria)-f

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

DUKUNG GERAKAN KAMPUNG PANGAN LESTARI Perlu Wacanakan Pembelian Lahan di Luar Yogya

YOGYA (KR) - Ketahanan pangan di tengah perubahan iklim global harus menjadi perhatian di daerah. Pemkot Yogya bahkan perlu mewacanakan pembelian lahan di luar kota untuk dijadikan pertanian yang hasilnya digunakan mendukung kebutuhan warga Kota Yogya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Susanto Dwi Antoro, menyebut tidak ada larangan bagi pemerintah daerah untuk membeli lahan di luar daerahnya demi kepentingan sumber daya. "Banyak daerah dari luar Yogya yang memiliki lahan di sini untuk dibangun asrama mahasiswa. Ke depan bisa kita beli lahan di luar kota untuk dibuat pertanian dan hasilnya dikembalikan ke kota," terangnya.

Dari total luas wilayah Kota Yogya yang mencapai 32,8 kilometer persegi, lahan pertanian yang masih tersisa kurang lebih hanya mencapai empat hektare. Jika dibanding dengan populasi penduduk yang lebih dari 400.000 jiwa di Kota Yogya maka kebutuhan pangan mengandalkan pasokan dari luar.

Toro, sapaan akrabnya, berharap ada data faktual terkait kebutuhan pangan bagi masyarakat

Susanto Dwi Antoro
Ketua Komisi B



KR-Istimewa

di Kota Yogya. Mulai dari kebutuhan beras, kebutuhan berbagai jenis sayuran hingga kebutuhan daging. Dari data itu lantas disandingkan dengan hasil pertanian yang diproduksi di Kota Yogya. "Dari situ setidaknya kita tahu berapa pasokan yang harus didatangkan. Sehingga ada gambaran luasan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung

sektor pertanian," imbuhnya.

Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendukung gerakan kampung pangan lestari yang sudah digencarkan pemerintah. Melalui gerakan itu, masyarakat yang memiliki lahan atau pekarangan bisa memanfaatkan dengan bercocok tanam secara sederhana. Terutama penggunaan media seperti polybag, pot bersusun dan sebagainya seperti gerakan lorong sayur. Apalagi jika gerakan itu dikombinasikan dengan budi daya ikan lele dengan media ember dan tong.

Bahkan, imbuhnya, keberadaan bank sampah yang dikelola masyarakat bisa dikolaborasi. Khususnya hasil budidaya maggot yang bisa menjadi suplay pakan ikan. Dengan siklus lorong sayur, lele cendol serta bank sampah maka rantai mewujudkan ketahanan pangan sudah terbangun. "Menjadi kebanggaan bagi warga jika apa yang dikonsumsi itu merupakan hasil produksi dari kampungnya sendiri. Apalagi jika gerakan semacam ini tumbuh dari masyarakat sehingga dinas harus berkomitmen untuk mendukung pengembangannya," urainya. (Dhi)-f